



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : **115** /HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KETIGA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE NOMOR : 105/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE – KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, maka dipandang perlu membentuk Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bone dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Bone Pemilihan

Gubernur ...

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana ...

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2108.

- Memerhatikan : 1. Berita Acara KPU Kab. Bone Nomor : 84/PP.05.3-BA/7308/KPU-BN/III/2018 tanggal 03 April 2018 perihal Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Otting Kecamatan Tellu Siattinge Se-Kabupaten Bone Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018;
2. Berita Acara KPU Kab. Bone Nomor : 88.1/PP.05.3-BA/7308/KPU-BN/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sanrego Kecamatan Kahu Se-Kabupaten Bone

Pada ...

Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE - KABUPATEN BONE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE 2018
- KESATU : Membentuk dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se – Kabupaten Bone pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone 2018 yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi :
- a. membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. mengangkat petugas pemuktahiran data pemilih;
 - d. mengumumkan daftar pemilih;
 - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - h. mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - j. melaksanakan ...

- j. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- l. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu;
- m. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- n. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta Pemilu;
- o. membuat berita acara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan dan PPK;
- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu lapangan;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

w. melaksanakan ...

w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 11 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

ttd

AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,



Y u s d a r

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone
 Nomor : **115** /HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IV/2018

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	N A M A
20.	TELLU SIATTINGE	1. Kel. Otting	1. RISWAN, SE
			2. ABD. ASIS
			3. USMAN, S.Pd
		2. Kel. Tokaseng	1. A. SURIANTI, SH
			2. ANDI WIDYANINGSIH
			3. ANDI HALIA AS
		3. Desa Palongki	1. SELPIANA
			2. LUKMAN
			3. JULWITA
		4. Desa Tajong	1. JUMRIYANI, S.Sos
			2. ANDI SUDEDI, S.Pd
			3. SUPARDI
5. Desa Ulo	1. JUMADI, S.Pd		
	2. ASWING		
	3. SIRAJUDDIN, S.Pd		
6. Desa Lanca	1. SUMARNI, S.Pd		
	2. ACHMADI, S.Pd		
	3. RAHMAN, S.Pd.I		
7. Desa Itterung	1. ISMAIL, S.Pd		
	2. KAHARUDDIN		
	3. MUSFIRA ANWAR		
8. Desa Mattoanging	1. HASANUDDING, S.Sy		
	2. AMNA DARTI PATHA, S.Pd.I		
	3. H. M.DARWIS		
9. Desa Lamuru	1. ANDI MUHAMMAD DARJAH		
	2. IRFAN YUNUS		
	3. HERAWATI, S.Pd		
10. Desa Waji	1. ANSYAR		
	2. H. SUKRIANTO		
	3. SYAHRIR, S.Pd		
11. Desa Ajjalireng	1. SUPRIADI		
	2. PUSPITA, S.Pd		
	3. BEDDU, S.Sos		
12. Desa Sijelling	1. ROSTANG, S.Pd		
	2. JUMARNI		
	3. HJ. ROSMIATI L, S.Pd		

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	N A M A
		13. Desa Lea	1. SUMARNI,S.Pd 2. FITRIANI, S.Pd 3. MARJAN SALAM, S.Pd
		14. Desa Pada Idi	1. KASWANTO 2. TAHIR, S.Pd 3. FATRA JAYA
		15. Desa Pongka	1. USMAN, S.Sos 2. ASMI 3. MUHAMMAD SINUSI, A.Ma
		16. Desa Lappae	1. SAHRIAMA 2. ABDUL JAMIL, SE 3. RISNAWATI
		17. Desa Patangnga	1. MUHAMMAD ARIFUDDIN 2. SAMSU RIJAL, A.Ma. PusT 3. BOY SANDI

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 11 April 2018

KETUA,

ttd

AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,


Y u s d a r

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Bone
 Nomor : 115/HK.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IV/2018

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	N A M A
2.	K A H U	1. Kel. Palattae	1. ZULFADLI AMAN, S.Pd 2. WALIAH 3. A. HARDIANSYAH, S.Pd
		2. Desa Nusa	1. ADHARIAH 2. IRWAN 3. SUDIRMAN
		3. Desa Pasaka	1. ENDAN SARINA, S.Pd 2. ASIS, S.Pd 3. AKBAR,SE
		4. Desa Labuaja	1. SUDIRMAN, A.Ma 2. AWALUDDIN 3. JUBAIR, S.Pd.I
		5. Desa Cakkela	1. ANDI MURBA 2. ANDI AKMAL, S.Pd.I 3. ANDI AHMAD HIDAYAT
		6. Desa Balle	1. ANDI KASMAWATI 2. NURIANTI, S.An 3. NURLIANAH
		7. Desa Matajang	1. ARMAN BIN UMAR 2. JUARSAH 3. SUNARDI
		8. Desa Cenrana	1. AISYAH,S.Pd 2. SAPARUDDIN R 3. Drs. MAPPENESSA
		9. Desa Sanrego	1. BULKIS, S.Pd 2. JUSMAN 3. JUMAIN, SH
		10. Desa Biru	1. MANSUR, SE 2. NELLY FATMAWATI, S.Pd 3. ANWAR ALWI, S.Pd
		11. Desa Palakka	1. HJ. MALMI, S.Pd 2. AJRI ANI FAJRI, S.KOM 3. SAPARUDDIN
		12. Desa Tompong Patu	1. A.NURWATI, S.Pd.,MM 2. ISMAIL, S.S 3. SUPRIADI

NO.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	N A M A
		13. Desa Hulo	1. FATMAWATI 2. AFFANDY 3. HASLINDAH
		14. Desa Cammilo	1. A. AZRUL AZWAR, S.Pd 2. SALMIATI. R 3. WAHDANIAH, S.Pd
		15. Desa Carima	1. ARMAN 2. SURIANI, S.Pd 3. A. LISMAH
		16. Desa Mattoanging	1. SUPARDI ABDULLAH 2. NURLAELAH, S.Ag 3. NURUL FEBRIANA
		17. Desa Arallae	1. JUSMAWATI 2. AGUSTIANI, S.Pd 3. AMIRUDDIN, S.Pd.SD
		18. Desa Bontopadang	1. SUKMAWATI, S.Pd.I 2. A. IRMAWATI, S.Pd 3. AMIR DAUS. B, S.Pd
		19. Desa Lallepo	1. MULIATI 2. FIRDAN, A.Ma 3. FRIANI
		20. Desa Maggenrang	1. A.IRMAYANTI 2. RAMLI, S.Pd 3. NIRMALASARI, S.Pd

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 11 April 2018

KETUA,

ttd

AKSI HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
Kepala Sub Bagian Hukum,


Yusdar